jurnal BENING Prodi Manajemen
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM

Jurnal Bening
Volume 13 No. 1 2026
ISSN: 2252-52672
P-ISSN 2252-5262

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024.

Puji Setya Sunarka [1], Caecilia Sri Haryanti[2], Angellia Manara Rambu Emu[3]
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Corresponding Author: psunarka@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah

©2026 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024. Populasi penelitian meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan periode pengamatan selama lima tahun (2020–2024). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Indonesia masih relatif rendah. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah belum optimal. Indriawati dan Hasmarini (2025) menemukan bahwa tingginya proporsi Dana Perimbangan dalam pendapatan daerah cenderung menurunkan tingkat kemandirian keuangan karena pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pusat dibandingkan mengembangkan potensi pendapatan daerah secara mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pramesti (2025) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi strategi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Selain PAD, Dana Perimbangan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dana Perimbangan

merupakan instrumen fiskal yang bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap Dana Perimbangan dapat menimbulkan moral hazard fiskal dan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Santi et al. (2024) menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat ketergantungan Dana Perimbangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih rendah dibandingkan daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan lokalnya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbesar di Indonesia yang memiliki karakteristik fiskal yang beragam. Perbedaan potensi ekonomi, kapasitas PAD, dan tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun, sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Mahardika dan Fauzan (2022) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, Novianti dan Ishak (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada variabel Dana Perimbangan, Darise (2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Mukaiyaroh dan Anik (2025) menemukan pengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru periode 2020–2024 dengan objek penelitian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini difokuskan pada pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada masa pemulihan ekonomi dan fiskal pascapandemi. Dengan karakteristik fiskal yang beragam, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi objek yang relevan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Sugiyono, (2023) mengungkapkan bahwa populasi dalam penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai ruang lingkup generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah sifat khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten & Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh yang juga disebut sensus. Teknik sampling jenuh merupakan metode pengambilan sampel non-probability dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan adalah 35 Kabupaten/Kota

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023). Variabel- variabel dalam penelitian ini meliputi dua jenis variabel antara lain :

1. Variabel Terikat (Dependen)

   Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, Kemandirian Keuangan Daerah berfungsi sebagai variabel dependen (Y).
2. Variabel Bebas (Independen)

   Variabel bebas (Independen) merupakan suatu tipe variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli (X1), Daerah Dana Perimbangan (X2)

Pengukuran Variabel

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan dan potensi daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan. PAD biasanya diukur melalui rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi dan target PAD, dan penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh positif PAD terhadap kemandirian keuangan daerah (Novianti & Ishak, 2022), (Indra Tama & Pujihastuti, 2022). Pada penelitian in, variabel Pendapatan Asli Daerah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \text{ x } 100\%$$

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Pengukuran variabel biasanya menggunakan rasio ketergantungan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah, yang menunjukkan sejauh mana daerah bergantung pada transfer pusat, dengan pengaruh terhadap kemandirian fiskal yang dapat positif atau negatif tergantung proporsi dan efisiensi alokasinya (Darise, 2024), (Falia et al., 2023) & (Mukaiyaroh & Anik, 2025). Pada penelitian ini, pengukuran variabel Dana Perimbangan diukur menggunakan rasio ketergantungan pada Dana Perimbangan

$$\text{Rasio Ketergantungan pada Dana Perimbangan} = \frac{\text{Realisasi (DAU+DAK+DBH)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ x } 100\%$$

3. Variabel Kemandirian Keuangan

Tingkat kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana daerah mampu menjalankan otonomi fiskal secara efektif dan berkelanjutan (Pramesti, 2025). Pada penelitian ini, variabel Kemandirian Keuangan dapat diukur menggunakan rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \; x \; 100\%$$

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan telah dipublikasikan, sehingga validitas serta reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan (Sekaran & Bougie, 2016). Data

penelitian berupa data runtut waktu (time series) selama periode 2020-2024 yang berfokus pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2020-2024 yang diakses melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, data yang telah terkumpul ditabulasi dan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan serta konsistensinya sebelum dilakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Kemandirian Keuangan) dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel Analisis Regresi Linear Berganda

	Coefficients [a]					
		Unstandarazied Coefficients		Standarized Coefficient		
Model		B	Std.Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,027	0,025		-40,430	0,001
	X1 Pendapatan Asli Daerah	0,012	0,104	0,006	0,119	0,906
	X2 Dana Perimbangan	-1,656	0,119	-0,743	-13,971	0,001

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = -1{,}027+0{,}012\ X1-1{,}656\ X2+_e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar -1,027 menunjukkan bahwa apabila variabel, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka nilai variabel dependen (Kemandirian Keuangan Daerah) sebesar -1,027.
2. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,012 menunjukkan hubungan yang positif, yang berarti setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,012 satuan.
3. Koefisien regresi untuk Dana Perimbangan (X2) menunjukkan angka negatif -1,656. Hal tersebut diartikan bahwa ketika Dana Perimbangan sebesar satu satuan akan menurunkan nilai variabel sebesar 1,656 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengujian Hipotesis

Uji koefisien regresi secara parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan atas pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sig < 0,005, hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sig > 0,05, hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji t dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Hasil Uji Hipotesis

Coefficients [a]						
		Unstandarazied Coefficients		Standarized Coefficient		
Model		B	Std.Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,027	0,025		-40,430	0,001
	X2 Pendapatan Asli Daerah	0,012	0,104	0,006	0,119	0,906
	X1 Dana Perimbangan	-1,656	0,119	-0,743	-13,971	0,001

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2026

Penentuan t tabel dapat dicari menggunakan rumus :

T tabel = t (α / 2 ; k – 1)
= t (0,05/2 ; 174 – 3 -1)
= t (0,025; 170)

T tabel didapatkan pada tabel senilai 1,974.

1. Variabel Dana Perimbangan (X1)

Hasil uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan koefisien sebesar 0,012, nilai signifikansi senilai 0,906 maka nilai signifikansi > 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,119 maka t hitung < t tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2)

Hasil uji t pada variabel Dana Perimbangan (X2) menunjukkan koefisien sebesar -1,027 , nilai signifikansi senilai 0,001 maka nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung sebesar – 13,971 maka t hitung > t tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar 0,012 dengan nilai signifikansi 0,906 (> 0,05) dan nilai t hitung 0,119 yang lebih kecil dari t tabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki hubungan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, namun pengaruhnya belum signifikan sehingga belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan tingkat kemandirian fiskal daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki koefisien sebesar -1,027 dengan nilai signifikansi 0,001 (< 0,05) dan nilai t hitung sebesar -13,971 yang lebih besar dari t tabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya masih bergantung pada sumber pendanaan eksternal dibandingkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Meskipun Dana Perimbangan berperan penting dalam mendukung pembiayaan daerah, peningkatan proporsinya dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan apabila tidak diimbangi dengan upaya optimalisasi PAD dan pengembangan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Hasil analisis mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Koefisien positif tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa PAD mempunyai peran penting dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah namun belum mampu menjadi faktor utama karena masih dominannya pembiayaan dari pemerintah pusat
2. Hasil analisis mengenai Pengaruh Dana Perimbangan terhadap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Koefisien negatif signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah maka akan menurunkan kemandirian fiskal pemerintah daerah tersebut.

SARAN

Saran-saran yanng dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya addalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta inovasi sumber pendapatan baru agar tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat dan tidak bergantung pada Dana Perimbangan.
2. Pemerintah pusat diharapkan tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Perimbangan agar penggunaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, D. (2020). Pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 45–58.

Darise, N. (2024). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 87–99.

Falia, R., Nugroho, A., & Wijayanti, S. (2023). Dana alokasi umum dan pengaruhnya terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 215–228.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 9(1), 44–56.

Indra Tama, R., & Pujihastuti, I. (2022). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 120–132.

Mahardika, E., & Fauzan, M. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 89–101.

Mukaiyaroh, Z., & Anik, S. (2025). Dana perimbangan dan dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 23–35.

Novianti, D., & Ishak, R. (2022). Pendapatan asli daerah dan pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 77–88.

Pramesti, A. (2025). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Daerah dan Pembangunan*, 10(1), 55–68.

Santi, N., Wulandari, D., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(2), 112–125.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). Pemerintah Republik Indonesia.